



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR ASET TETAP PADA KEMENTERIAN AGAMA
RI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Dwi Andrya Oktavionita

1802043006

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA AKUNTANSI
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR ASET TETAP PADA KEMENTERIAN AGAMA
RI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Dwi Andrya Oktavionita

1802043006

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A.Md)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA AKUNTANSI
JAKARTA
2021

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

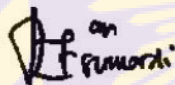
Judul Tugas Akhir : **Prosedur Aset Tetap Pada Kementerian Agama RI**
Nama : **Dwi Andrya Oktavionita**
NIM : **1802043006**
Program Studi : **D3 Akuntansi**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Evaluasi Laporan Tugas Akhir

Jakarta, 31 Juli 2021

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



Oki Irawan., SE., M.Si



Sumardi., SE., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul :

PROSEDUR ASET TETAP PADA KEMENTERIAN AGAMA RI

oleh :

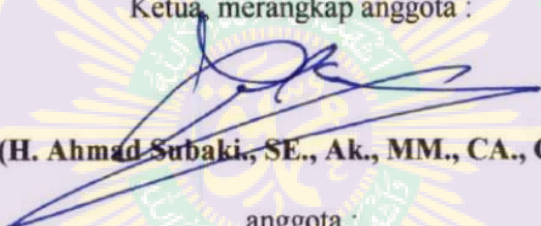
DWI ANDRYA OKTAVIONITA
1802043006

telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

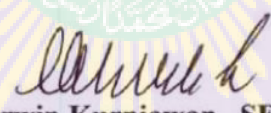
Pada tanggal: 13 Agustus 2021

Tim Penguji

Ketua, merangkap anggota :


(H. Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA)

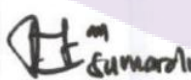
anggota :


(Herwin Kurniawan., SE., MM)

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR.
HAMKA


Oki Irawan., SE., M.Si

Oki Irawan., SE., M.Si


Dr. Zulpahmi, M.Si

Dr. Zulpahmi, M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul **“Prosedur Aset Tetap Pada Kementerian Agama Republik Indonesia”** merupakan hasil karya saya pribadi dengan keyakinan dan pengetahuan, saya tidak mencantumkan hasil karya orang lain atau bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya yang diajukan untuk gelar maupun ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 13 Agustus 2021

Yang Menyatakan,



Dwi Andrya Oktavionita

1802043006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah. Shalawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Berkat rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan dari Allah, dukungan baik secara moril, materil serta doa kedua orang tua, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan sesuai sistematika penulisan. Laporan tugas akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban saya secara tertulis setelah melakukan kegiatan pengamatan.

Laporan tugas akhir menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi dalam mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Laporan ini berjudul "Prosedur Aset Tetap Pada Kementerian Agama RI".

Selain itu pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak atas segala doa, dukungan dan semangat selama terselenggaranya kegiatan pengamatan hingga penyusunan laporan tugas akhir.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi., SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Beliau dosen pembimbing saya yang selalu membantu, memberikan arahan dalam pelaksanaan serta penyusunan laporan tugas akhir.
4. Bapak M. Nurasyidin., SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

5. Bapak Edi Setiawan., SE., M.M. selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA .
6. Bapak Oki Irawan., SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
7. Seluruh staf Kementerian Agama RI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pengamatan.

Semoga laporan ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan atas hal tersebut saya meminta maaf, saya sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun.

Jakarta, 02 Agustus 2021



Dwi Andrya Oktavionita
NIM : 1802043006

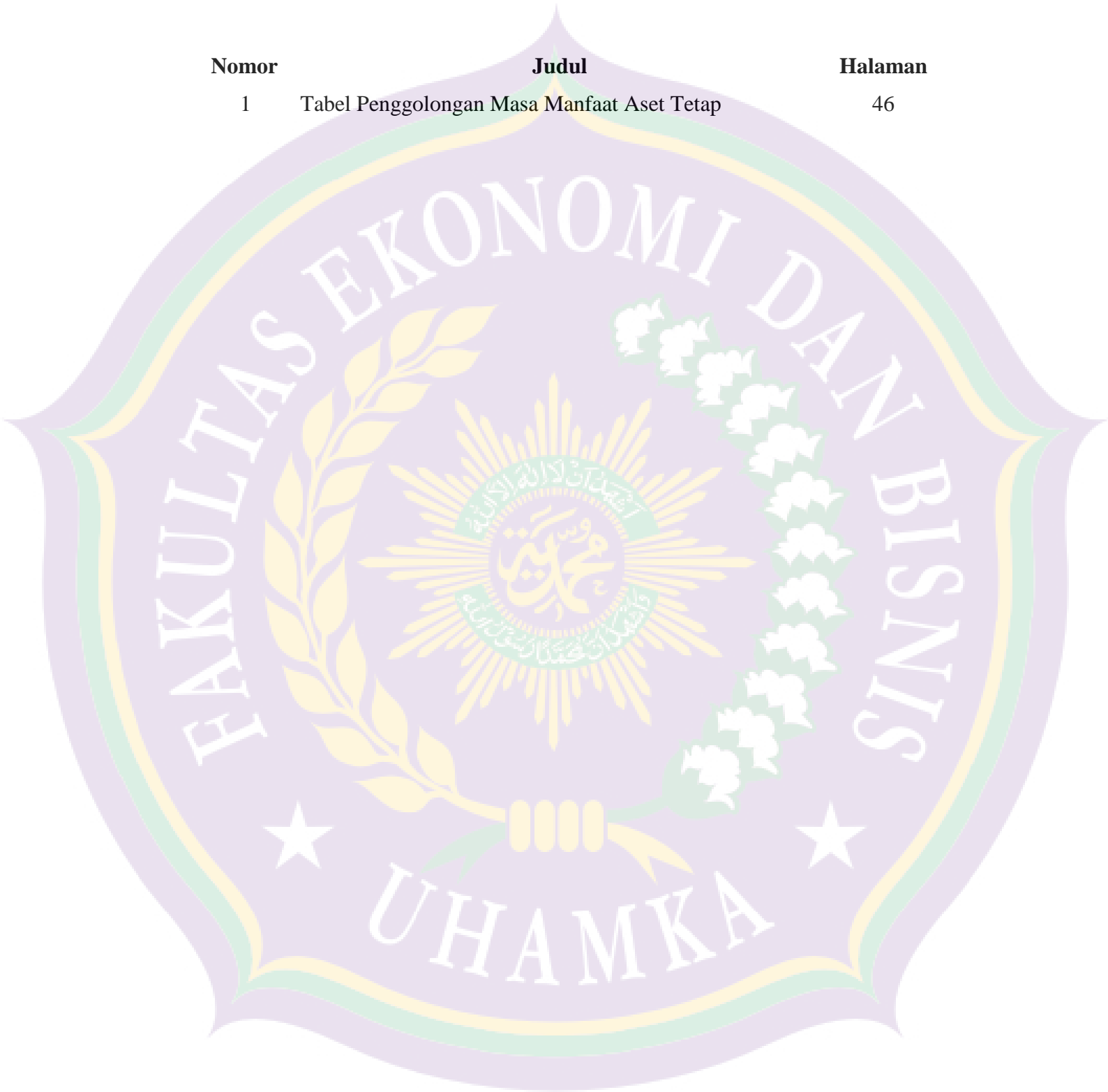
DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.2.1 Pokok Permasalahan	6
1.2.2 Pembatasan Permasalahan	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
1.3.1 Tujuan Penulisan	6
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	7
1.4 Metode Penulisan	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Prosedur.....	9
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	9
2.2 Sektor Publik	9
2.2.1 Pengertian Sektor Publik	9
2.2.2 Pengertian Akuntansi Sektor Publik.....	10
2.3 Aset Tetap.....	11
2.3.1 Pengertian Aset Tetap.....	11
2.3.2 Karakteristik Aset Tetap	11
2.3.3 Klasifikasi Aset Tetap	12
2.3.4 Harga Perolehan Aset Tetap	13

2.3.5	<i>Cara Memperoleh Aset Tetap</i>	14
2.3.6	<i>Pengertian Penyusutan</i>	16
2.3.7	<i>Metode Penyusutan</i>	16
2.3.8	<i>Faktor-Faktor Penyusutan</i>	18
2.3.9	<i>Prosedur Aset Tetap</i>	18
BAB III		27
HASIL DAN PEMBAHASAN		27
3.1	Sejarah Perusahaan	27
3.1.1	<i>Sejarah Kementerian Agama Republik Indonesia</i>	27
3.1.2	<i>Profil Singkat Kementerian Agama Republik Indonesia</i>	29
3.1.3	<i>Visi dan Misi Perusahaan</i>	30
3.1.4	<i>Struktur Organisasi</i>	31
3.1.5	<i>Layanan Kementerian Agama RI</i>	34
3.2	Pembahasan	35
3.2.1	<i>Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Aset Tetap Kemenag RI</i>	35
3.2.2	<i>Prosedur Pengadaan serta Penatausahaan Aset Tetap Kemenag RI</i>	37
3.2.3	<i>Perhitungan Penyusutan Aset Tetap Kemenag RI</i>	46
3.2.4	<i>Prosedur Penghapusan Aset Tetap Kemenag RI</i>	47
3.2.5	<i>Dokumen Terkait Pengadaan Aset Tetap Kemenag RI</i>	49
BAB IV		58
PENUTUP		58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran	59
DAFTAR PUSTAKA		60

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Tabel Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	46



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Struktur Organisasi Secara Umum	31
2	Struktur Organisasi Pada Biro Umum	32
3	Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Aset Tetap Kementerian Agama RI	35
4	Proses Pengadaan Aset Tetap Kementerian Agama RI	37
5	Prosedur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Agama RI	38
6	Prosedur Serah Terima Barang Kementerian Agama RI	41
7	Prosedur Pembukuan Aset Tetap Kementerian Agama RI	43
8	Prosedur Inventarisasi Aset Tetap Kementerian Agama RI	44
9	Berita Acara Serah Terima Aset Tetap	49
10	Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung	50
11	Undangan Penunjukan Pengadaan Langsung	51
12	Surat Perintah Kerja	52
13	Surat Penetapan Harga Aset Oleh Penyedia	53
14	Harga Perkiraan Sendiri	53
15	Nota Dinas	54
16	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja	54
17	Daftar Rincian Permintaan Pembayaran	55
18	Faktur Pajak	55
19	Kuitansi Pengadaan	56
20	Surat Setoran Pajak	57

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4	Format Evaluasi Tugas Akhir	4/5
5	Daftar Riwayat Hidup	5/5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai jenis badan usaha baik yang berorientasi laba (*profit*) seperti perusahaan dagang, jasa dan manufaktur maupun tidak berorientasi laba (*non profit*) seperti Instansi Pemerintahan (Kementerian, Komisi Pemberantas Korupsi, Komisi Pemilihan Umum) dan organisasi milik negara (rumah sakit, yayasan, lembaga pendidikan milik negara).

Meskipun tujuan berbeda, setiap badan usaha memiliki aset tetap dalam menunjang kegiatan operasionalnya. Fungsi aset tetap pada badan usaha orientasi laba, untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dapat membantu memaksimalkan keuntungan. Sedangkan, aset tetap pada badan usaha tidak berorientasi laba sebagai sarana mewujudkan target kinerja program.

Dalam sektor publik, semua kegiatan dilaksanakan berdasarkan ketetapan anggaran. Menurut Indrajit & Djokopranoto (2016 : h. 135), anggaran merupakan “perencanaan kerja dalam bentuk uang yang melengkapi rencana kerja, yang harus dibuat setiap tahun”. Penyusunannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sektor publik pada periode berjalan terkait program yang akan dilaksanakan serta sumber daya yang dibutuhkan agar dapat terealisasi dengan baik.

Keberhasilan dalam menyusun dan melaksanakan anggaran menjadi indikator pencapaian kinerja sektor publik pada periode berjalan. Menurut Surputro, dkk (2016, vol. 1 : h. 28), kualitas dari anggaran memiliki pengaruh terhadap

ketepatan anggaran, semakin tinggi kualitasnya maka akan memperbesar pencapaiannya. Hal ini berarti, untuk mencapai target dari kinerja, anggaran harus disusun dengan baik dan sesuai ketentuan.

Anggaran sebagai dasar dalam pelaksanaan program sektor publik termasuk saat pengadaan aset tetap. Pengadaan aset tetap badan usaha tidak berorientasi laba harus menyesuaikan kebutuhan dan proses perencanaannya dilakukan dua tahun sebelum tahun pelaksanaan anggaran.

Aset tetap menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi sektor publik agar pelaksanaan program dapat terealisasi dengan baik. Menurut hasil penelitian, aset tetap memiliki karakteristik yaitu masa penggunaannya lebih dari satu tahun, dengan nilai perolehan besar dan tujuan utama untuk kegiatan usaha (Mubarok, dkk, 2019 : h. 123). Nilai perolehannya meliputi semua biaya yang harus dibayarkan sampai aset tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan.

Aset tetap pada sektor publik terdiri atas dua jenis yaitu berwujud dan tidak berwujud. Pengelompokan aset tetap berwujud meliputi tanah, gedung serta bangunan, peralatan serta mesin, irigasi serta jaringan, jalan dan konstruksi dalam masa pengerjaan. Sedangkan aset tetap tidak berwujud seperti lisensi, hak cipta, hak paten, *software* dan lain-lain.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 225/PMK.05 tahun 2019, pengukuran aset tetap didasarkan atas biaya perolehan aset. Apabila biaya perolehan tidak dapat diidentifikasi, maka dinilai berdasarkan nilai wajar. Biaya perolehan aset tetap tidak dapat diidentifikasi terjadi atas aset hibah.

Pada sektor publik, aset tetap diperoleh dengan cara membeli, membangun sendiri maupun hibah. Aset tetap (tidak termasuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan) mengalami penyusutan masa manfaat. Menurut hasil penelitian, penyusutan diartikan sebagai penurunan kegunaan aset tetap sebagai bagian dari harga perolehan yang telah kadaluarsa disebabkan pemakaian (Thian, 2021 : h. 69). Penyusutan aset berwujud disebut depresiasi, sedangkan penyusutan aset tidak berwujud disebut amortisasi.

Setiap sektor publik memiliki metode penyusutan aset tetap yang berbeda. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No 07, metode penyusutan aset tetap berwujud meliputi garis lurus, saldo menurun ganda dan unit produksi. Dikarenakan hampir semua aset tetap mengalami penyusutan, sehingga untuk menjaga fungsinya, dalam anggaran tahunan terdapat nominal khusus pemeliharaan.

Sumber penerimaan sektor publik berasal dari dana masyarakat umum baik pajak, non pajak maupun hibah. Sehingga semua penggunaan atas dana harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan sebagai indikator pelaksanaan dari target kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diberikan telah dikelola dengan baik.

Aset tetap menjadi salah satu komponen yang harus disajikan dalam laporan keuangan. Nilai yang tersaji termasuk semua nilai akumulasi (total) penyusutan yang telah terjadi atas aset tetap. Menurut Hasransyah, dkk (2017, 14 (1) : h. 38) mengemukakan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap memiliki pengaruh terhadap

laporan keuangan. Hal ini berarti, apabila terjadi salah penyajian aset tetap dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan sektor publik harus sesuai standar akuntansi pemerintah yang berlaku termasuk pengungkapan aset tetap. Dampak salah saji nilai aset tetap dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan penganggaran aset, perhitungan biaya pemeliharaan dan opini auditor terhadap laporan keuangan.

Dalam aset tetap diperlukan penerapan sistem manajemen akuntansi. Menurut hasil penelitian, penerapan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan (Amaliah, dkk, 2019, vol. 6 : h. 128). Hal ini berarti, sektor publik harus memiliki sistem informasi manajemen akuntansi aset tetap yang baik, agar laporan keuangan berkualitas. Apabila kualitas laporan keuangan sektor publik menurun akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan anggaran berikutnya.

Ketika proses pengadaan aset tetap, terdapat resiko penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan anggaran. Menurut berita dari detik.com 26 April 2021, eks Pejabat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama didakwa merugikan negara sebesar Rp 23 miliar terkait pengadaan laboratorium komputer di Madrasah Tsanawiyah tahun 2011 (<https://news.detik.com>, 2021).

Dalam laman tersebut dikabarkan mantan kepala bagian umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Undang Sumantri bersama rekanan (Affandi Mochtar pejabat penandatanganan surat perintah membayar, Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad Maulana dan Noufal *deputy general manager business service regional* PT.

Telekomunikasi Indonesia). Pihak tersebut telah merugikan negara dengan melakukan tindakan melanggar hukum untuk mengambil keuntungan pribadi.

Kerugian yang dialami negara sebesar Rp 23.636.653.074 dengan rincian Rp 13.650.200.500 (memperkaya PT. Batu Karya Mas), Rp 5.095.645.960 (memperkaya PT. Telekomunikasi Indonesia 2 kontrak pengadaan sebesar Rp 57.750.000.000, dialihkan ke PT. Primarindo Ikat Nusantara/PINs Rp 52.654.354.040), Rp 4.890.806.614 (memperkaya PT. PINs, karena 2 kontrak tersebut kembali dialihkan ke 11 rekanan senilai Rp 47.763.547.426). Dalam proses pengadaan terdapat kekurangan pekerjaan karena audio set yang dikirim 2,67% ke lokasi tetapi permintaan pencairan dana yang diajukan sebesar 100%.

Kepatuhan pelaksanaan terhadap prosedur aset tetap terhadap peraturan pemerintah menjadi suatu keharusan bagi sektor publik. Hal ini dapat mengantisipasi resiko terjadinya penyalahgunaan wewenang, sehingga program tahun berjalan dapat terlaksana dengan baik dan terwujudnya target kinerja laporan keuangan yaitu opini wajar tanpa pengecualian.

Berdasarkan pemaparan dan kasus tersebut, saya sangat tertarik untuk mengetahui prosedur aset tetap dari penganggaran hingga penghapusan pada sektor publik. Sehingga, saya menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul “**Prosedur Aset Tetap Pada Kementerian Agama Republik Indonesia**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur perencanaan dan penganggaran aset tetap Kementerian Agama RI ?
2. Bagaimana prosedur pengadaan serta penatausahaan aset tetap Kementerian Agama RI?
3. Bagaimana prosedur penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI?
4. Apa saja dokumen yang terkait pengadaan aset tetap Kementerian Agama RI?

1.2.2 Pembatasan Permasalahan

Penerapan prosedur terkait proses perencanaan serta penganggaran, pengadaan, penatausahaan dan penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan laporan tugas akhir :

1. Untuk mengetahui prosedur perencanaan, pembuatan anggaran aset tetap Kementerian Agama RI
2. Untuk mengetahui prosedur pengadaan serta penatausahaan aset tetap Kementerian Agama RI.
3. Untuk mengetahui prosedur penghapusan aset tetap Kementerian Agama RI.
4. Untuk mengetahui dokumen prosedur aset tetap Kementerian Agama RI.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir meliputi :

1. Bagi Mahasiswa :

Laporan tugas akhir menjadi sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai prosedur aset tetap sektor publik, meningkatkan *softskill* dalam menyusun laporan dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa.

2. Bagi Universitas :

Hasil penulisan laporan tugas akhir sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman teori mahasiswa, mendapatkan informasi mengenai prosedur aset tetap di instansi pemerintahan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam menyusun laporan dengan topik sama, sehingga dapat dibahas lebih lanjut.

3. Bagi Instansi :

Hasil penulisan laporan diharapkan dapat membantu memberikan saran atas kekurangan dari penerapan prosedur aset tetap di instansi, sebagai masukan pengambilan keputusan terkait prosedur serta membantu meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1.4 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data dalam menyusun laporan tugas akhir, meliputi :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan penulisan laporan dengan mencari teori dasar aset tetap (berasal dari berbagai sumber buku serta jurnal penelitian) dan kebijakan prosedur aset (bersumber dari peraturan pemerintah dan ketentuan akuntansi yang berlaku umum).

2. Wawancara :

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat pengelola aset tetap untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang diterapkan pada instansi.

3. Observasi :

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap setiap proses yang terjadi pada aset tetap serta dokumen terkait, baik proses perencanaan serta penganggaran, pengadaan, penatausahaan dan penghapusan aset tetap.

4. Praktik Kerja

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman atas penerapan prosedur aset tetap dengan melakukan praktik kerja selama 3 bulan di Kementerian Agama RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, T.H., dkk. (2019). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara dan Penerapan Sistem Infomasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *JAWARA : Jurnal Wawasasn dan Riset Akuntansi*. 6 (2), 128-129.
- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik Univeritas Muhammadiyah Sidoarjo*. Sidoarjo : UMSIDA Press.
- Fuad, M., dkk. (2020). *Anggaran Perusahaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, N. (2018). *Corporate Social Responbility Edisi 2*. Yogyakarta : Expert
- Hasransyah, G., dkk. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Keuangan. *Kinerja : Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. 14 (1), 31-39.
- Indrajit, R.E. & Richardus, D. (2016). *Manajemen Perguruan Tinggi Modern Modul Pembelajaran Berbasis Standar Kompetensi dan Kualifikasi Kerja (Edisi 2)*. Yogyakarta : Preinexus.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan : Pusaka Almada.
- Mubarok, A., dkk. (2019). *Manajemen Keuangan Aplikasi Pada Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah*. Yogyakarta : Expert.
- Normi, S. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta : Expert.
- Nuraini, F. & Andrianto. (2020). *Akuntansi Keuangan Menengah I Berdasarkan SAK-ETAP*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Putri, Z. (2021, 26 April). *Eks Pejabat Kemenag Didakwa Rugikan Negara Rp 23 M di Proyek Lab MTs*. Diakses pada 17 Juni 2021, dari <https://news.detik.com/berita/d-5547339/eks-pejabat-kemenag-didakwa-rugikan-negara-rp-23-m-di-proyek-lab-mts/5>.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/PMK.05 Tahun 2019, Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2020, Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 Tahun 2010, Tentang Akuntansi Aset Tetap.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 16, Tentang Aset Tetap.

RN, R. (2017). *Step By Step Lancar Membuat SOP*. Yogyakarta : Huta Publisher.

Setyowati, M. S., dkk. (2016). *Pengantar Akuntansi 2*. Jakarta : PT Kharisma Putra Utama.

Soeradi. (2019). *Akuntansi Pemerintah berbasis akrual Era Baru Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam sistem Perbendaraan dan Anggaran Negara (SPAN)*. Yogyakarta : Expert.

Surputro, F., dkk. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Anggaran Sektor Publik. *Jurnal Of Accounting and Business*. 1 (2), 27-28.

Thian, A. (2021). *Pengantar Akuntansi 1 & 2*. Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI).

Tim Penyusun. (2008). *Buku Panduan Laporan Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D-3)*. Jakarta. Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Yuesti, A. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Bali : CV Noah Aletheia.